

Korelasi Islam dan Politik Dalam Pandangan Ahmad Syafi'i Ma'arif (Buya Syafi'i)

Kevin Orama Singarimbun¹, Junaidi²
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
skevinorama@gmail.com, junaidi@uinsu.ac.id

Abstrak

Jurnal ini membahas mengenai pemikiran politik Ahmad Syafi'i Ma'arif dalam ruang lingkup korelasi antara Islam dan Politik. Biografi beliau juga dijelaskan secara ringkas. Ia pernah mengemban jabatan sebagai Ketua Umum PP Muhammadiyah pada tahun 1998-2005. Penelitian ini menerapkan metode kualitatif disertai dengan studi pustaka (*library research*) yang dijadikan sebagai sumber utama data penelitian. Ahmad Syafi'i Ma'arif menyebutkan bahwa korelasi antara Islam dan Politik adalah bentuk ijtihad dengan sumber Al-Quran dan Hadist. Politik Islam tidak mempunyai kaitan dengan perebutan kekuasaan, namun justru memprioritaskan upaya untuk memenuhi kepentingan pihak umum. Beliau juga menyebutkan bahwa dalam ajaran Islam wawasan kekuasaan harus disinari oleh wawasan moralitas sebagai salah satu indikator iman dalam konteks dan realitas sejarah. Secara sederhana, Islam menjadi pergerakan dalam memperbaharui moral dan masyarakat sehingga menjadi pribadi yang sesuai dengan ajaran Islam, sekaligus menjadi inheren atas ajaran Nabi Muhammad SAW.

Kata Kunci : Korelasi, Islam, Politik, Ahmad Syafi'i Ma'arif

Abstract

This journal discusses the political thought of Ahmad Syafi'i Ma'arif within the scope of the correlation between Islam and politics. His biography is briefly described. He had accepted the position of Chairman of PP Muhammadiyah in 1998-2005. This research applies qualitative methods accompanied by library research which is used as the main source of research data. Ahmad Syafi'i Ma'arif stated that the correlation between Islam and politics is a form of ijtihad with Al-Quran and Hadith sources. Political Islam has nothing to do with the struggle for power; but instead prioritizes efforts to fulfill the interests of the public. He also mentioned that in Islamic teachings the insight of power must be illuminated by the insight of morality as an indicator of faith in historical context and reality. In simple terms, Islam is a movement in reforming morals and society to become a person who is in accordance with Islamic teachings, as well as being inherent in the teachings of the Prophet Muhammad SAW.

Keywords : Correlation, Islam, Political, Ahmad Syafi'i Ma'arif

I. PENDAHULUAN

Indonesia memiliki dinamika yang sangat menggembirakan dalam ruang lingkup perkembangan pemikiran Islam. Berbagai faktor memberikan pengaruh yang tidak kecil, salah satunya adalah kontribusi para tokoh pemikiran Islam dari beragam perspektif, salah satunya yaitu Ahmad Syafi'i Ma'arif (Buya Syafi'i). Ahmad Syafi'i Ma'arif merupakan salah satu tokoh sentral pemikiran Islam di Indonesia, yang juga sering disapa sebagai 'Buya Syafi'i'. Beliau lahir pada 31 Mei 1935 di sumpur kudus, Sijunjung, Sumatera Barat dan meninggal dunia pada tanggal 27 Mei 2022 di Gamping, Sleman, Yogyakarta. Buya Syafi'i pernah mengemban jabatan sebagai Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah pada periode 1998-2005. Buya Syafi'i juga Presiden di *World Confrence On Religion For Peace (WCRP)*, yakni sebuah organisasi lintas agama untuk perdamaian dunia. Buya Syafi'i juga merupakan seorang tokoh yang mendirikan *Ma'arif Institute For Culture and Humanity*, yakni sebuah institusi kelembagaan sipil yang

berperan dalam membela kebhinekaan di Indonesia serta menyampaikan nilai-nilai keislaman dan kemanusiaan.¹

Hubungan agama dan politik mungkin setua masyarakat. Selama hubungan itu terjalin, selalu saja terjadi benturan-benturan nilai yang sulit untuk diuraikan, sehingga parameter hubungan antar agama dan politik dalam sebuah negara dapat dijadikan landasan pergerakan aktivitas politik dalam sebuah negara. Dalam artian, nilai-nilai moralitas agama harus mampu diinternalisasikan dan diobjektifikasikan dalam praktek politik di sebuah negara.²

Buya Syafi'i mengonstruksikan Islam sebagai sebuah ajaran agama yang bersifat universal, dalam artian menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan secara luas dan mendalam. Menurut Buya Syafi'i secara cermat, dalam konteks politik di tanah air terdapat tiga masalah besar yang menjadikan hubungan antar agama dan politik selalu diwarnai ketegangan. Hal tersebut terjadi dikarenakan antara lain, *Pertama*, terjadinya pembusukan moralitas agama. Pembusukan moralitas dalam beragama menjadi sulit untuk dicarikan solusinya, dikarenakan kesadaran para politisi dan pejabat pemerintahan di lingkaran kekuasaan dalam berpegang teguh terhadap nilai-nilai moralitas agama sangatlah rapuh. *Kedua*, terjadinya hegemoni negara dalam wilayah agama. Tatkala negara banyak mempengaruhi otoritas kebijakan dalam sebuah agama yang sesungguhnya sangat bersifat privasi. Dalam hal ini, negara menjadi sebuah kekuatan eksternal yang mencoba merampas otonomi sebuah agama. *Ketiga*, maraknya manipulasi simbol-simbol keagamaan. Penampakan simbolisme semu tersebut sesungguhnya berharap agar sebahagian politisi mendapatkan nilai lebih daripada elit-elit politik yang lainnya. Dengan modus itu, seorang politisi bisa saja menjadikan simbol-simbol keagamaan sebagai sebuah instrumen yang bertujuan dalam mewujudkan cita-cita politik yang bersifat temporal.³

Oleh sebab itu, adalah sebuah kenyataan bahwasanya agama sering dijadikan sebagai sebuah alat politik yang kemungkinan dapat melahirkan sejumlah keprihatinan dalam sebuah negara. Oleh karena nya, mungkin para elit politik perlu kiranya untuk merumuskan ulang karakter moral sebagai entitas orang-orang yang beragama dan sangat menghargai pesan-pesan moralitas. Dengan demikian, nilai-nilai normativitas agama akan tetap menjadi sebuah arah kiblat seluruh elemen bangsa dalam berbagai hal, khususnya dalam berpolitik. Tentu saja nilai-nilai normativitas dalam beragama harus dapat diobjektifikasikan secara nyata dan tidak hanya diuraikan secara retorika.⁴

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kepustakaan (*library research*) dengan sifat yang kualitatif, yaitu jenis penelitian dengan cara melakukan pengumpulan data, informasi, serta bermacam data yang ditemukan pada kepustakaan.⁵ Dengan sifat penelitian yang deskriptif, artinya proses analisa pada data yang digunakan akan memberikan pemaparan terkait data tersebut, namun tidak menarik kesimpulan yang bersifat general.⁶

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Riwayat Hidup Ahmad Syafi'i Ma'arif

Ahmad Syafi'i Ma'arif terlahir pada tanggal 31 Mei 1935 di Calau Kenagarian, Sumpur Kudus, Kecamatan Sumpur Kudus, Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat. Ketika berusia 18 bulan, ibunya yang bernama Pathiyah meninggal dunia di usianya yang masih 32 tahun. Ayahnya memiliki nama Ma'rifah Rauf Dt. Rajo Melayu merupakan orang terpandang

¹ Abdul Rohim Ghazali & Saleh Partaonan Daulay, *Muhammadiyah & Politik Islam Inklusif*, (Jakarta:MAARIF Institute for Culture and Humanity, 2005), hlm.37

² Subhan Setowara & Soimin, *Agama dan Politik Moral*, (Malang:Intrans Publishing, 2013), hlm.63

³ Subhan Setowara & Soimin, *Agama dan Politik Moral*, (Malang: Intrans Publishing,2013), hlm.65-66

⁴ Ibid.,hlm.67

⁵Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), hlm. 42

⁶Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, Cet.2, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011),hlm.

(kepala suku) Melayu, hal itulah yang menyebabkan beliau menerima gelar *Datuk Rajo Melayu*, yang menerima jabatan pada tahun 1936-1945.⁷

Seperti anak pada umumnya, Ahmad Syafi'i Ma'arif menempuh dunia pendidikan di dasarnya di SD dan Madrasah Ibtidaiyyah Muhammadiyah yang berada di daerah Sumpur Kudus. Dan ketika lulus, beliau meneruskan jenjang pendidikannya di Madrasah Muallimin di daerah Lintau. Di sinilah Ia menerima banyak ilmu dan mulai memasuki pemikiran yang dewasa. Tidak hanya itu, Ia juga melanjutkan pendidikan tingginya di Kulliyatul Muallimin Yogyakarta, dengan ilmu dan pengalaman yang lebih hebat. Setelah menyelesaikan pendidikannya, Buya Syafi'i mengabdikan dirinya di daerah Lombok Timur menjadi seorang tenaga pengajar selama kurang lebih satu tahun. Ia pun memutuskan untuk kembali ke kampung halamannya, dan melanjutkan kembali pendidikan di Universitas Cokroaminoto pada tahun 1957-1964 dan mendapatkan gelar B.A. Buya Syafi'i menimba ilmu di dunia perkuliahan sambil bekerja dalam memenuhi kehidupannya.⁸

Pekerjaan yang dilakoni oleh Buya Syafi'i merupakan guru ngaji, mengolah besi tua, kerja di toko pakaian, berjualan hewan peliharaan, serta menjadi guru di beberapa sekolah. Guna memaksimalkan gelar sarjana yang dimilikinya, Buya Syafi'i melanjutkan studinya Fakultas Keguruan Ilmu Sosial IKIP Yogyakarta, dan Ia juga berkuliah di Northern Illinois University Tahun 1972. Namun di kampus tersebut, ia tidak mampu untuk menuntaskan pendidikannya dikarenakan oleh masalah ekonomi dan anaknya yang sedang jatuh sakit. Usai permasalahan tersebut selesai, ia melanjutkan pendidikannya kembali di Universitas Hawaii dan Ohio University di kota Athens. Ia berhasil menerima beasiswa Fullbright dengan judul tesis *Islamic Politics Under Guided Democracy In Indonesia (1959-1965)* di bawah bimbingan Prof. William H. Frederick, Ph.D.⁹

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kepribadian Syafi'i Ma'arif, antara lain adalah keluarga, kebudayaan Minangkabau, Muhammadiyah dan pendidikan di Amerika Serikat, diantaranya:

1. Keluarga

Keluarga Buya Syafi'i sangat taat terhadap agamanya. Garis keturunan ayah Buya Syafi'i merupakan keturunan yang aktif dalam organisasi Pendidikan Islam Persatuan Tarbiyyah Islamiyyah (Perti), sedangkan garis keturunan ibu beliau dari keluarga Muhammadiyah yang orientasinya memurnikan ajaran Islam dengan metode sosial dan pendidikan Islam.¹⁰

2. Kebudayaan Minangkabau

Lingkungan dan ajaran-ajaran kebudayaan Minangkabau juga mempengaruhi pemikiran dan sifat Buya Syafi'i. Ajaran-ajaran dan falsafah-falsafah Minangkabau banyak diperoleh Buya Syafi'i semenjak kecil. Salah satu falsafah Minangkabau yang mempengaruhi pemikiran dan sifat Buya Syafi'i adalah *adat basandi syara', syara' basandi kitabullah* dan *syara' mangato adaik mamakai*.¹¹ Falsafah tersebut memiliki makna yaitu apabila Syariat Islam menjelaskan, maka yang menerapkannya adalah adat. Dalam artian bahwa adat tidak akan pernah menentang apa yang telah dijelaskan dan diajarkan oleh Al-Quran dan Hadist. Maka, adat Minangkabau telah lekat dalam pemikiran dan membentuk karakter dan sifat dari dalam diri Ahmad Syafi'i Ma'arif.

3. Muhammadiyah

⁷ Abdul Rohim Ghazali & Saleh Partaonan Daulay, "Muhammadiyah & Politik Islam Inklusif," (Jakarta: MAARIF Institute for Culture and Humanity, 2005), hlm. 37

⁸ Ibid., hlm. 129

⁹ Abdul Rohim Ghazali & Saleh Partaonan Daulay, "Muhammadiyah & Politik Islam Inklusif," hlm. 131

¹⁰ Mar'ati Zarro, "Muhammadiyah Sebagai Gerakan Islam dan Pendidikan," Vol.9, No.1, Jurnal Sejarah dan Pendidikan Sejarah, (2020), hlm.66

¹¹ Mar'ati Zarro, *Muhammadiyah Sebagai Gerakan Islam dan Pendidikan*, ..., hlm.67

Muhammadiyah juga sangat mempengaruhi kepribadian Buya Syafi'i. Pendidikan di organisasi Muhammadiyah sudah diperoleh Buya Syafi'i semenjak kecil hingga berusia lanjut. Buya Syafi'i menyatakan bahwa kesuksesan yang ia peroleh juga dipengaruhi oleh Muhammadiyah.¹² Doktrin yang terdapat di organisasi Muhammadiyah sangat berpengaruh terhadap kepribadian nya. Hal tersebut dapat dilihat dalam pemikiran Buya Syafi'i yang berkaitan tentang kaitan antara seorang Muslim dengan negaranya. Organisasi Muhammadiyah mempunyai konsep bahwa suatu negara *Dar al-ahd wa al-syahadah*, artinya ragam etnis, budaya, agama, dan ras yang terdapat di Indonesia berjanji untuk membentuk suatu Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan berisi tindakan nyata untuk membangun negara yang dibentuk.

4. Pendidikan di Amerika Serikat

Ada beberapa guru dan teman yang turut memberikan pengaruh dalam pemikiran Buya Syafi'i antara lain adalah KH. Djazarie Hisjam yang memberikan motivasi agar lebih giat dalam mempelajari makna dari metodologi *istinbat al-ahkam* serta makna *ijtihad*. Prof. William H. Frederick adalah seorang peneliti sekaligus dosen di OSU yang mengajarkan mengenai pendekatan sejarah. Prof. Fazlur Rahman juga mempunyai pengaruh besar terhadap Buya Syafi'i dalam ruang lingkup pemikiran Islam.¹³

Pemikiran yang disampaikan oleh Buya Syafi'i menjadi kontroversial dalam pendidikan dunia Barat. Tidak hanya sebatas membahas mengenai kaitan antara ajaran Islam dengan negara, namun juga membahas mengenai toleransi umat beragama. Beliau menyebutkan bahwa toleransi umat beragama sangat dirasakannya ketika ia menempuh pendidikan di Chicago. Ia juga menganggap bahwa pemahannya terhadap Al-Quran terasa lebih kuat ketika ia berada di negara Barat.

Ahmad Syafi'i Ma'arif adalah seorang penulis dengan karya yang banyak membahas mengenai sejarah dan ajaran Islam. Ia memulai kegiatan ini sejak Ia menempuh pendidikan di Mu'allimin Yogyakarta hingga ia berusia 50 tahun. Beberapa karya hebat yang ditulis oleh beliau, yaitu:

"Islam Dalam Bingkai Keindonesiaan dan Kemanusiaan pada tahun 2009, Menerobos Kemelut Refleksi Cendekiawan Muslim pada tahun 2006, Titik-titik Kisar di Perjalananku pada tahun 2006, Menggugah Nurani Bangsa pada tahun 2005, Mencari Autentitas Dalam Kegagalan pada tahun 2004, Independensi Muhammadiyah di Tengah Pergumulan Pemikiran Islam dan Politik pada tahun 2000, Islam & Politik : Membingkai Peradaban pada tahun 1999, Islam Kekuatan Doktrin dan Keagamaan Umat pada tahun 1997, Keterkaitan Antara Sejarah, Filsafat dan Agama pada tahun 1997, Islam dan Politik : Teori Belah Bambu Masa Demokrasi Terpimpin pada tahun 1995."¹⁴

B. Pemikiran Politik Ahmad Syafi'i Ma'arif

Islam adalah ajaran yang menjadikan Al-Quran dan Hadist sebagai sumbernya. Al-Quran adalah kitab yang membahas mengenai Tuhan, alam dan manusia. Ketika ketiga topik tersebut berhasil dipahami dan diterapkan dengan baik, maka akan menciptakan kehidupan yang bermartabat dan memperbaiki kehidupan yang rakus pada masa sebelumnya.¹⁵

Berdasarkan pendapat yang disampaikan oleh Buya Syafi'i, bahwa Al-Quran membutuhkan umat yang cerdas dengan wawasan yang luas. Al-Quran diturunkan kepada seluruh umat manusia, hal itulah yang menuntut umat Islam untuk mengukir wawasan yang lebih luas. Beliau menyebutkan bahwa wawasan mempunyai tingkat yang berbeda yang

¹²Ahmad Syafi'i Ma'arif, *Titik-Titik Kisar di Perjalananku: Autobiografi Ahmad Syafi'i Ma'arif*, (Jakarta: Mizan dan MAARIF Institute For Culture And Humanity, 2009), hlm. 229

¹³Leni Marlana, *Hubungan Islam dan Negara dalam Pandangan Ahmad Syafi'i Ma'arif*, Vol.3, No.2, Jurnal Mantiq, (2018), hlm. 28

¹⁴ Abdul Rohim Ghazali & Saleh Partaonan Daulay, *Muhammadiyah dan Politik Islam Inklusif*, (Jakarta: MAARIF Institute For Culture And Humanity, 2005), hlm. 20

¹⁵ Ahmad Syafi'i Ma'arif, *Membumikan Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Yogyakarta, 1995), hlm. 3

disesuaikan dengan sensitifitas jiwa yang dimiliki. Dalam konteks ini, maka diperlukan satu metode yang bertujuan untuk menangkap pancaran sinyal-sinyal kebenaran tersebut, yakni dakwah.¹⁶

Buya Syafi'i menyatakan bahwa dakwah adalah bentuk pekerjaan yang membumbui kehidupan manusia dengan Islam, iman, dan takwa untuk membangun kehidupan yang bahagia kini dan nanti. Jenis pekerjaan ini tidak akan pernah berakhir. Umat Islam tetap mempunyai tanggung jawab untuk menyampaikan risalah baik dari ajaran Islam dengan berbagai metode yang sesuai dan mudah diterima oleh masyarakat. Salah satu ucapan terbaik adalah ucapan yang menyerukan diri kepada Allah SWT, melakukan amal soleh, dan berserah menjadi salah satu anggota komunitas Muslim (Surah Fussilat:33), yang komunitas sendi moral, Islam, serta takwa dengan perpaduan yang utuh. Komunitas Islam bukan merupakan komunitas yang eksklusif, dikarenakan tidak tergoyahkan oleh dinamika yang bertebaran di lapangan. Hanya dengan mengandalkan dalamnya iman dan kecerdasan, maka hendaknya masyarakat mampu menghadapi perubahan dan moral yang meningkat.¹⁷ Dapat ditarik kesimpulan bahwa dakwah Islam adalah tindakan untuk mengajak kebaikan, dan bertujuan dalam membangun sendi iman, Islam serta takwa dan mencapai kebajikan dan kebenaran.

Dalam tulisan-tulisannya, Ahmad Syafi'i Ma'arif terlihat memiliki sebuah tekad untuk menjadikan Islam sebagai agama dengan kekuatan yang transformatif pada umatnya. Namun sungguh disayangkan, Buya Syafi'i justru mengakui obsesinya tersebut masih jauh panggang dari api. Beliau menyebutkan bahwa umat Islam saat ini mempunyai nilai dalam peradaban, yang diakibatkan oleh beberapa indikator. Indikator yang pertama yaitu dikarenakan hilangnya prinsip musyawarah pada dunia Islam. Hal tersebut terlihat dalam sistem dinasti yang gamblang akan dunia Islam dan doktrin etika serta moralitas Al-Quran. Konsep politik yang selaras dengan ajaran Islam hanya dirasakan ketika periode Nabi dan *Al-khulafa al-rasyidin*, terkhusus ketika terjadi perang siffin. Namun konsep politik tersebut perlahan hilang tertelan dengan konsep perintah raja, khalifah, sultan dan presiden. Indikator yang kedua adalah Moralitas Al-Quran yang dijadikan sebagai komoditas politik.¹⁸ Contohnya adalah ketika hadirnya komponen-komponen umat untuk menyiarkan syariat Islam dan/atau dihidupkannya kembali Piagam Jakarta. Beliau mengatakan bahwa kelompok-kelompok tersebut merupakan satu kelompok yang lebih memberikan penekanan beragama terhadap simbol daripada substansi atau dapat dikatakan lebih memiliki ketertarikan terhadap politik gincu atau politik bendera daripada politik garam.¹⁹

Ahmad Syafi'i Ma'arif memberikan tiga unsur kritikan terhadap kelompok-kelompok radikal (lebih mementingkan simbol daripada substansi), antara lain adalah sebagai berikut :

Pertama, Kelompok Islam radikal hanya mengikuti syariat Islam dengan kaku, yakni hanya dalam ruang lingkup hukum dan fiqihnya saja. Contohnya, ketika proses aktualisasi hukuman rajam maupun potong tangan dalam syariat Islam, yang dapat menjadi implikasi negatif bagi Islam itu sendiri, karena adanya pandangan masyarakat bahwa Islam itu menyeramkan. *Kedua*, Kelompok Islam radikal berpandangan bahwasanya pengaktualisasian Syari'ah hanya tersandar atas hukum fiqih serta pengamatan parsial (hitam-putih), dan tidak memandang makna dari pengalaman historis dengan kesan adanya hal yang membandingkan antara setiap penerapan syariat Islam di dunia. Sudan dan Afganistan yang menggunakan konsep seperti ini hingga kini masih dipenuhi oleh persoalan. Kelompok ini tidak pernah belajar atas pengalaman dan selalu menerima dukungan dari suara terbanyak. *Ketiga*, Buya Syafi'i memperingatkan untuk setiap masalah besar yang dihadapi oleh umat

¹⁶ Ahmad Syafi'i Ma'arif, *Membumikan Islam*,..., hlm. 31

¹⁷ Ahmad Syafi'i Ma'arif, *Islam & Politik : Upaya Membingkai Peradaban* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2018), hlm. 256

¹⁸ Abdul Rohim Ghazali & Saleh Partaonan Daulay, *Muhammadiyah & Politik Islam Inklusif*, (Jakarta : MAARIF Institute For Culture And Humanity, 2005) ,hlm. 20-21

¹⁹ Abdul Rohim Ghazali & Saleh Partaonan Daulay, *Muhammadiyah & Politik Islam Inklusif*,..., hlm. 22

Islam di Indonesia tidak harus diatasi dengan penerapan syariat Islam, hal ini disebabkan oleh karena umat Islam tidak boleh hanya memandang realitas bangsa dalam satu sisi.²⁰

Terlihat jelas bahwa Buya Syafi'i tidak menerima adanya formalisasi atas syariat Islam. Ia lebih cenderung menjadikan syariat Islam sebagai agama keadilan dan tidak hanya sebagai patokan hukum dengan sifat yang partikular. Pandangan politik Buya Syafi'i lebih mendukung atas nilai substansif dalam Islam, seperti kesejahteraan, kebebasan, kedamaian, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.²¹

Poin-poin mengenai pemikiran politik Ahmad Syafi'i Ma'arif dapat dirangkum sebagai berikut :

Pertama, Ahmad Syafi'i Ma'arif berpendapat bahwasanya Islam merupakan satu ajaran yang bersumber kepada Al-qur'an dan apabila umat Islam memahami dengan baik dan benar serta melaksanakan perintah-perintah Al-qur'an, maka peradaban yang ramah dan bermartabat dapat diwujudkan.

Kedua, Ahmad Syafi'i Ma'arif berpendapat bahwasanya dalam mewujudkan suatu peradaban yang ramah dan bermartabat, maka diperlukan dakwah. Dakwah merupakan suatu pekerjaan yang menggarami kehidupan umat manusia dengan nilai-nilai iman, Islam dan takwa. Menurut Ahmad Syafi'i Ma'arif, politik juga merupakan suatu pekerjaan yang bertugas dalam menegakkan sendi-sendi keimanan, Islam dan takwa dalam komunitas umat Islam.

Ketiga, menurut Ahmad Syafi'i Ma'arif tampilnya Islam sebagai agama yang memiliki kekuatan transformatif merupakan suatu obsesi yang jauh panggang dari api. Hal tersebut dikarenakan oleh dua faktor, yakni (1), hilangnya prinsip musyawarah dalam dunia Islam dan (2), Doktrin dan etika moralitas Al-qur'an masih lebih menonjol dalam retorika, bahkan menjadi komoditas politik para politisi daripada menjadi pedoman hidup bagi manusia.

Keempat, Ahmad Syafi'i Ma'arif berpendapat bahwasanya konsep syari'at merupakan sebuah esensi Islam sebagai agama keadilan. Syari'at bukan semata-mata hukum-hukum yang bersifat partikular. Ahmad Syafi'i Ma'arif memiliki pemikiran politik yang secara tegas menolak segala bentuk formalisasi syari'at. Menurut Syafi'i Ma'arif, syari'at bukan berarti menegakkan sebuah sistem secara pendekatan hukum-hukum Islam dalam sebuah negara. Menurut Syafi'i Ma'arif, penegakan nilai-nilai substansif di dalam Islam, seperti persamaan hak, keadilan, kesejahteraan, kedamaian, kebebasan dan menjunjung tinggi hak asasi manusia lebih penting daripada sekedar menegakkan formalisasi syari'at.

C. Korelasi Islam dan Politik Dalam Pandangan Ahmad Syafi'i Ma'arif

Buya Syafi'i berpendapat bahwa Islam mempunyai kaitan yang sangat erat dengan politik, dibuktikan dengan Al-qur'an yang tidak pernah memisahkan jarak antara kedua belah pihak. Menurutnya, ajaran Islam harus mempunyai wawasan yang dipenuhi dengan moral sebagai indikator iman dan dengan konteks serta realitas sejarah.²² Dalam aspek kepercayaan atau ibadah pada umumnya, Al-qur'an memberi penjelasan secara rinci. Akan tetapi, dalam aspek politik ketatanegaraan dan sosial bermasyarakat, penjelasan Al-qur'an bersifat umum atau hanya memberikan garis-garis besarnya saja. Hal tersebut dimaksudkan agar ajaran Islam selalu *up to date* selaras dengan perkembangan zaman. Azas-azas politik kenegaraan yang diajarkan Al-qur'an tersebut antara lain adalah azaz amanah, azaz ketaatan, azaz keadilan (*al-a'dalah*), azaz musyawarah (*al-syura*), dan azaz persamaan (*al-musawah*).²³

²⁰Sultani, *Pemikiran dan Aksi Politik Ahmad Syafi'i Ma'arif*, Vol.1, No.3, Journal Of Islamic Thought and Muslim Culture, (2021), hlm.6-7

²¹Abdul Rohim Ghazali & Saleh Partaonan Daulay., hlm. 33-36

²²Ahmad Sholikin, *Pemikiran Politik Negara dan Agama "Ahmad Syafi'i Ma'arif"*, Vol.2, No.1, Jurnal Politik Muda, (2012), hlm.5

²³Katimin, *Politik Islam: Studi Tentang Azaz, Pemikiran dan Praktik Dalam Sejarah Politik Umat Islam*, (Medan: PERDANA PUBLISHING, 2017), hlm.1-2

Sudut pandang yang dapat dijadikan sebagai landasan dalam memahami korelasi antara Islam dan politik, yaitu ayat Al-Quran dan Hadist. Hal ini dikarenakan cukup banyak ayat Al-Quran yang membahas mengenai hukum dan aturan dalam ruang lingkup masyarakat, seperti QS Al-an'am:162 "*Katakanlah : sesungguhnya Sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam*". Menurut Buya Syafi'i, pada ayat tersebut dijelaskan bahwa Shalat di masjid, kegiatan berniaga di pasar, atau bahkan jabatan seseorang tidak menjadi hal yang tergolong dikotonomis diantara ibadah dan pekerjaan. Shalat di Masjid adalah termasuk kegiatan beribadah, sedangkan pidato politik adalah pekerjaan yang terpisah dari wawasan moral. Namun beliau tidak sependapat dengan hal tersebut, karena ia beranggapan bahwa keduanya tergolong dalam dimensi ibadah.²⁴

Lebih lanjut Buya Syafi'i Ma'arif memberikan argumentasi tentang politik yang termaktub di Al-qur'an pada QS Adz-zariyyat:56 "*Dan aku tidaklah menciptakan jin dan manusia, melainkan untuk agar mereka mengabdikan kepadaku*". Pada ayat tersebut tersirat bahwa diciptakannya jin dan manusia adalah dalam rangka ibadah. Oleh karena nya, mesin kekuasaan daripada institusi politik, yakni negara harus dapat menjadi sebuah instrumen yang baik agar layak dijadikan sebagai kiprah dalam beribadah. *Kedua*, gerakan sosio moral Islam yang membutuhkan kekuasaan politik di dalamnya guna menyuarakan pesan-pesan yang ingin disampaikan.²⁵ Doktrin tentang perintah terhadap yang baik (*amr bi al-makruf*) dan pencegahan terhadap yang buruk (*nahy'an al-munkar*) adalah asas dari adanya kekuasaan, dengan tujuan untuk memberikan penegakan terhadap moral. Sedangkan perilaku politik hanya berupaya untuk melegalkan *status quo* kekuasaan yang dikorupsi, yang menyebabkan berbagai tindakan amoral jika dilihat dari sudut pandang Islam. Secara sederhana, Islam yang menjadi pergerakan dalam memperbaharui moral dan masyarakat menjadi pribadi yang sesuai dengan ajaran Islam, sekaligus menjadi inheren atas ajaran Nabi Muhammad SAW.²⁶

Dalam sistem politik yang diinginkan oleh Islam, nilai spiritual dan intelektual harus saling melengkapi satu sama lain. Masyarakat hendaknya tidak terpengaruh atas pertarungan yang terjadi pada postulat "*cogito ergo sum*" (saya berpikir maka saya ada) Rene Descartes dan spritualisme Al-ghazali. Sikap yang cenderung berarah pada ekstremitas harus dicegah.²⁷ Ekstremitas merupakan pendapat yang disampaikan oleh pemikir Islam terkait pernyataan bahwa Islam adalah *diin wa daulah*. Artinya, Islam dan politik pada suatu negara merupakan bentuk kesatuan yang utuh.

Beliau juga menyebutkan bahwa "*pedang penolong*" alias negara juga menjadi hal yang penting dalam Islam. Karena jika tidak ada negara, maka Islam tidak akan diterima dalam ruang lingkup sosial. Hal ini juga menjadi salah satu alasan beliau untuk menolak konsep *ad-din wa ad-daulah* dikarenakan konsep tersebut akan menyebabkan ketidaksesuaian pola pikir. *Din* (agama) mempunyai sifat yang *immutable* (tetap), sedangkan *daulah* (negara) mempunyai sifat yang *mutable* (tidak tetap) yang bisa saja mengalami perubahan sesuai waktu dan ruang yang ada. Sedangkan konsep tersebut akan menggambarkan kesetaraan antara agama dan negara.²⁸

Kelompok Islam radikal memiliki keinginan dalam melakukan penerapan Syari'at dan merubah situasi menjadi radikal. Masalah-masalah mendasar dalam satu bangsa tidak akan terpecahkan oleh formulasi syariat. Islam harus dapat menjadi inspirasi yang mewarnai kehidupan dalam berwarga negara serta tidak dapat dijadikan sebagai sebuah ideologi formal. Apabila Islam dijadikan sebagai sebuah ideologi yang bersifat formal, maka berpotensi besar dalam melahirkan kecemburuan sosial. Hal tersebut disebabkan oleh karena orang-orang

²⁴Ahmad Asroni, *Pemikiran Ahmad Syafi'i Ma'arif Tentang Negara dan Syari'at Islam di Indonesia*, Vol.X, No.2, Jurnal Millah, (2011), hlm.13

²⁵Ahmad Syafi'i Ma'arif, *Islam & Politik: Upaya Membingkai Peradaban*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2018), hlm. 275

²⁶Ahmad Syafi'i Ma'arif, *Islam & Politik : Upaya Membingkai Peradaban,...*, hlm. 276

²⁷Ahmad Syafi'i Ma'arif, *Islam & Politik : Upaya Membingkai Peradaban,...*, hlm. 277-279

²⁸Ahmad Syafi'i Ma'arif, *Islam dan Politik di Indonesia*, (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Press, 1988), hlm.

Non-Muslim akan menganggap bahwa telah terjadi sebuah diskriminasi dalam ruang lingkup bermasyarakat.²⁹

Beliau juga dengan tegas menolak segala hal yang berkaitan dengan formalisasi syariat. Secara sederhana, pemikir Islam yang mengusung konsep tersebut mengagungkan negara sebagaimana mengagungkan agama. Lantas, apa bedanya dengan teori Hegel yang menganggap bahwa negara adalah makhluk penaka Tuhan (*a God like creature*)?.³⁰

D. Realisasi Pemikiran Politik Ahmad Syafi'i Ma'arif di Organisasi Muhammadiyah

Latar belakang berdirinya organisasi Muhammadiyah tidak dapat dilepaskan dari refleksi KH. Ahmad Dahlan terhadap kondisi sosial-politik dimasa kolonialisme. Kolonialisme politik dan kultural mendorong lahirnya perlawanan kultural. Maka Muhammadiyah sejak kemunculannya tidak bisa dinafikkan keberadaannya sebagai salah satu organisasi yang merintis dan memperjuangkan kemerdekaan.

Kondisi sosial dan politik yang dipenuhi dengan tindakan penindasan serta ketidakadilan, disertai pula dengan masalah internal pada umat Islam itu sendiri, menjadi acuan terbentuknya kiprah Muhammadiyah. Maka meskipun kondisi politik bangsa yang penuh dengan keprihatinan, namun Muhammadiyah menerapkan pendekatan secara kultural dan tidak memberikan orientasi pada kekuasaan, akan tetapi hanya pada prinsip peradaban dan kemanusiaan.

Semangat yang berkobar-kobar tersebut ditemukan pula pada saat Ahmad Syafi'i Ma'arif memimpin organisasi Muhammadiyah. Apa yang telah dilakukan oleh Buya Syafi'i sungguh patut diapresiasi. Beliau menjadikan organisasi Muhammadiyah sebagai gerakan Islam yang melaksanakan dakwah *amar ma'ruf nahi munkar*. Oleh karenanya, Muhammadiyah bergerak dalam wilayah artikulasi yang lebih luas dan tidak terjebak terhadap perebutan kekuasaan politik. Buya Syafi'i Ma'arif menegaskan jati diri Muhammadiyah sebagai organisasi masyarakat Islam yang bertujuan guna meningkatkan keadilan dan adab masyarakat selaras dengan nilai islami. Gerakan tersebut sungguh telah memposisikan Islam sebagai *rahmatan lil alamin*.³¹

Khittah Muhammadiyah mengamanatkan Buya Syafi'i Ma'arif selaku pimpinan tertinggi untuk tetap menjaga Muhammadiyah dari kecenderungan terhadap salah satu partai politik tertentu. Namun, kasus dukungan Muhammadiyah kepada Calon Presiden RI Prof. Amien Rais pada Pemilu tahun 2004 menimbulkan tanda tanya besar.

Ada tiga hal yang harus dicermati dalam konteks kasus tersebut. *Pertama*, sungguh pun Muhammadiyah secara sadar memilih jalur dan usaha pembinaan dan pemberdayaan masyarakat, namun Muhammadiyah juga mengambil "kegiatan-kegiatan politik tidak langsung" dengan sifat memberikan pengaruh terhadap proses dan kebijakan negara sebagai wujud dari dakwah *amar ma'ruf nahi munkar*. Hal ini bertujuan agar konstitusi dan cita luhur bangsa tetap terpenuhi. Peran yang dimainkan Muhammadiyah tersebut adalah bagian daripada fungsi kelompok kepentingan, tanpa harus mengorbankan diri. *Kedua*, Muhammadiyah secara tegas meminta kepada para kader-kader Muhammadiyah yang bernaung di semua partai politik untuk *all out* dan berupaya secara sungguh-sungguh dalam melakukan setiap tugas dan kewajibannya dengan memperhatikan ajaran Islam. *Ketiga*, Muhammadiyah mendorong secara kritis dan bertanggung jawab atas sifat praktis yang terdapat dalam ruang lingkup politik serta orientasi kekuasaannya, selaras dengan cita dan harapan bangsa Indonesia.³²

²⁹Ahmad Fahrozi, *Pemikiran Politik Menurut Prof. Dr. H. Katimin, M.AG*, (Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam, 2020), hlm.60

³⁰Abdul Rohim Ghazali & Saleh Partaonan Daulay, *Muhammadiyah & Politik Islam Inklusif*, (Jakarta: MAARIF Institute For Culture And Humanity), hlm. 39-40

³¹*Ibid.*, hlm. 13-14

³²*Ibid.*, hlm. 15-17

Oleh sebab itu, falsafah hidup *amar ma'ruf nahi munkar* yang senantiasa dipegang Muhammadiyah, tidak hanya bergumul dalam pemikiran, melainkan juga tindakan. Buya Syafi'i Ma'arif menjadikan falsafah hidup Muhammadiyah tersebut sebagai landasan bahwa Muhammadiyah merupakan gerakan dakwah. Namun sebagai gerakan dakwah, falsafah tersebut tidak hanya dimaknai dalam "ruang sempit", melainkan dimaknai dalam pengertian yang lebih luas. Buya Syafi'i Ma'arif memaknai gerakan dakwah Muhammadiyah dalam konteks politik kerakyatan dan kebangsaan. Dalam artian, Buya Syafi'i Ma'arif mengkondisikan Muhammadiyah agar tetap peduli terhadap situasi, perkembangan dan arah politik yang terjadi, tanpa harus terlibat dalam perebutan kekuasaan. Kepedulian Muhammadiyah ditempatkan terhadap orientasi kepentingan rakyat dan bangsa.

Sikap dan fatsoen politik Ahmad Syafi'i Ma'arif tersebut menyebabkan Muhammadiyah sepanjang sejarahnya belum pernah mengalami prahara politik intern yang membawa perpecahan dalam internal tubuh organisasi Muhammadiyah dimasa kepemimpinan Buya Syafi'i. Faktor yang menciptakan keselamatan bagi organisasi Muhammadiyah dimasa kepemimpinan Buya Syafi'i. Sikap beliau yang independen serta menjadikan pandangan politik tidak dalam konteks politik kekuasaan.³³

IV. KESIMPULAN

Ahmad Syafi'i Ma'arif menyebutkan bahwa korelasi yang terjalin antara Islam dan politik merupakan suatu bentuk ijtihad yang berasal dari Al-Quran dan Hadits. Politik adalah tindakan ibadah dengan tidak mempunyai perbedaan nilai dengan ibadah lainnya. Politik dalam ruang lingkup Islam tidak hanya membahas mengenai kekuasaan, namun juga memikirkan cara untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya. Beliau menyebutkan bahwa ajaran Islam mempunyai wawasan moralitas yang menjadi indikator iman pada konteks sejarah.

Beliau menyatakan bahwa terdapat dua sudut pandang yang dijadikan sebagai acuan dalam memahami korelasi antara Islam dan politik. *Pertama*, terlihat dari kandungan Al-Quran dan hadist. Ahmad Syafi'i Ma'arif memberikan interpretasi mengenai korelasi Islam dan politik yang termaktub di dalam QS Adz-zariyyat:56 "*Dan aku tidaklah menciptakan jin dan manusia, melainkan untuk agar mereka mengabdikan kepadaku*". Dalam ayat tersebut, tersirat bahwa Allah SWT menciptakan jin dan manusia adalah dalam rangka ibadah. Oleh karenanya, mesin kekuasaan daripada institusi politik yang tidak lain adalah negara, harus mampu untuk menjadi sebuah instrumen yang baik sebagai bentuk kristalisasi daripada ibadah. *Kedua*, gerakan sosio moral Islam membutuhkan kekuasaan politik guna menyuarakan pesan-pesan yang disampaikan oleh ajaran Islam itu sendiri.

Doktrin tentang perintah terhadap yang baik (*amr bi al-makruf*) dan pencegahan terhadap yang buruk (*nahy'an al-munkar*) adalah asas dari adanya kekuasaan, dengan tujuan untuk memberikan penegakan terhadap moral. Sedangkan perilaku politik hanya berupaya untuk melegalkan *status quo* kekuasaan yang dikorupsi, yang menyebabkan lahirnya berbagai tindakan amoral dalam sudut pandang Islam. Secara sederhana, Islam menjadi pergerakan dalam memperbaharui moral dan masyarakat sehingga menjadi pribadi yang sesuai dengan ajaran Islam, sekaligus menjadi inheren atas ajaran Nabi Muhammad SAW.

DAFTAR PUSTAKA

- Emzir. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ghazali, Partaonan. 2005. *Muhammadiyah & Politik Islam Inklusif*. Jakarta: MAARIF Institute For Culture And Humanity.
- Katimin. 2017. *Politik Islam: Studi Tentang Azaz, Pemikiran dan Praktik Dalam Sejarah Politik Umat Islam*. Medan: PERDANA PUBLISHING.
- Ma'arif, Syafi'i. 1995. *Membumikan Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Yogyakarta.
- Ma'arif, Syafi'i. 1998. *Islam dan Politik di Indonesia*. Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Press.
- Ma'arif, Syafi'i. 2018. *Islam & Politik : Upaya Membingkai Peradaban*. Yogyakarta: IRCiSoD.

³³Abdul Rohim Ghazali & Saleh Partaonan Daulay, *Muhammadiyah & Politik Islam Inklusif*..., hlm. 18

- Ma'arif, Syafi'i. 2009. *Titik-Titik Kisar di Perjalananku: Autobiografi Ahmad Syafi'i Ma'arif*. Jakarta: Mizan dan MAARIF Institute For Culture And Humanity.
- Sarwono, Jonathan. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Setowara, Soimin. 2013. *Agama dan Politik Moral*. Malang: Intrans Publishing.
- Asroni, Ahmad. 2011. "Pemikiran Ahmad Syafi'i Ma'arif Tentang Negara dan Syari'at Islam di Indonesia". Vol. X. No. 2. Jurnal Millah.
- Marlena, Leni. 2018. "Hubungan Islam dan Negara dalam Pandangan Ahmad Syafi'i Ma'arif". Vol. 3. No. 2. Jurnal Mantiq.
- Sultani. 2021. "Pemikiran dan Aksi Politik Ahmad Syafi'i Ma'arif". Vol. 1. No. 3. Journal Of Islamic Thought and Muslim Culture.
- Sholikin, Ahmad. 2012. "Pemikiran Politik Negara dan Agama Ahmad Syafi'i Ma'arif". Vol. 2. No. 1. Jurnal Politik Muda.
- Zarro, Mar'ati. 2020. "Muhammadiyah Sebagai Gerakan Islam dan Pendidikan". Vol. 9. No. 1. Jurnal Sejarah dan Pendidikan Sejarah.
- Fahrozi, Ahmad. 2020. "Pemikiran Politik Menurut Prof. Dr. H. Katimin, M.AG". Skripsi. Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara: Medan.